



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BKAD KOTA MEDAN
SUMATERA UTARA (Studi Kasus Kantor
Walikota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NURUL ARDIKA
1915100042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN BKAD KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA MEDAN)

NAMA : NURUL ARDIKA
N.P.M : 1915100042
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Irawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Nur Aliah, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Ardika
N.P.M : 1915100042
Fakultas/Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima kensekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2024
Yang Menyatakan



Nurul Ardika
Npm: 1915100042

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Ardika
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan, 22 Sep 2001
N.P.M : 1915100042
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl.Banteng, gg sederhana Medan Helvetia

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2024

Yang Menyatakan



Nurul Ardika

NPM: 1915100042

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BKAD KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rumus Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan sudah cukup baik dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian dikategorikan partisipatif karena nilai rata-rata kemandiriannya 62.39%. Rasio Keserasian mengalami kestabilan dengan rata-rata 82.50%. Dan meskipun Rasio Pertumbuhan menunjukkan hasil yang negatif dimana pendapatan mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 6.58%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan

ABSTRACT

This research is entitled "ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BKAD CITY OF MEDAN SUMATERA UTARA (Case Study of Medan Mayor's Office)". This study aims to determine how well the financial performance of Regional Original Revenue based on the Independence Ratio, Compatibility Ratio and Growth Ratio at the Regional Financial and Asset Management Agency of Medan City. The type of research used in this research is quantitative descriptive. The data processed is the financial report of Regional Original Revenue in the Regional Revenue and Expenditure Budget from 2018 to 2022. The data collection techniques used are documentation techniques and literature studies. The data analysis technique used in this research is descriptive quantitative with the formula of the Independence Ratio, Concordance Ratio and Growth Ratio. The results of this study indicate that in general the financial performance of the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency is quite good in managing Regional Original Revenue finances. This can be seen from the results of the calculation of the Independence Ratio categorized as participatory because the average value of independence is 62.39%. The Compatibility Ratio experienced stability with an average of 82.50%. And although the Growth Ratio shows negative results where revenue has decreased with an average value of 6.58%.

Keywords: *Financial Performance, Independence Ratio, Concordance Ratio and Growth Ratio*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Riset pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl.Kapten Maulana Lubis No.2 Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan , nasehat dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan teristimewa kepada orangtua tercinta dan tersayang yang memberikan Doa, dukungan, motivasi, nasehat dan bantuan secara moril maupun material yaitu Ayah Edi Brand, SE dan Ibu Nuraini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si, Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Irawan, SE., M.Si Pembimbing I yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Nur Aliah, S.E., M.Si Pembimbing II yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Saudari tercinta Tiara Ramadani yang selalu memberikan Doa, Nasihat, Dukungan, dan Motivasi.
8. Seluruh Teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan, terutama bagi perkembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik.

Medan, Januari 2024
Penulis

Nurul Ardika
NPM: 19151000042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I :PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	4
1.3.Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5.Keaslian Penelitian.....	6

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori.....	8
2.1.1.Teori Keagenan	8
2.1.2.Pengertian Analisis Keuangan	9
2.1.3.Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan.....	10
2.1.4.Pengertian Kinerja.....	10
2.1.5.Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan	11
2.1.6.Metode Penilaian Kinerja.....	12
2.1.7.Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah	13
2.1.8.Manfaat Pengukuran Kinerja	15
2.1.9.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	15
2.1.10.Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD	18
2.1.11.Analisis Rasio Keuangan Pada APBD.....	19
2.2.Penelitian Terdahulu	23
2.3.Kerangka Konseptual	24

BAB III :METODE PENELITIAN

3.1.Pendekatan Penelitian	26
3.2.Tempat Dan Waktu Penelitian	26
3.3.Populasi Dan Sampel	27
3.3.1.Populasi	27
3.3.2.Sampel.....	27
3.4.Jenis Dan Sumber Data	28
3.4.1.Jenis Data	28
3.4.2.Sumber Data.....	28
3.5.Defenisi Operasional dan Pengukuran	28
3.6.Teknik Pengumpulan Data	30

3.7. Teknik Analisa Data	32
BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	32
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
4.1.2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas	34
4.1.3. Analisis Data	39
4.2. Pembahasan.....	48
BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59
BIODATA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.LRA Kota Medan 2018-2022	3
Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1.Skedul Proses Penelitian	27
Tabel 4.1.Perhitungan Rasio Kemandirian 2018-2022	41
Tabel 4.2.Perhitungan Rasio Belanja Operasi 2018-2022	43
Tabel 4.3.Perhitungan Rasio Belanja Modal 2018-2022	45
Tabel 4.4.Perhitungan Rasio Pertumbuhan 2018-2022.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Bagan Organisasi BKAD Kota Medan	34
Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemandirian 2018-2022	42
Gambar 4.3 Grafik Rasio Belanja Operasi 2018-2022	44
Gambar 4.4 Grafik Rasio Belanja Modal 2018-2022	46
Gambar 4.5 Grafik Rasio Pertumbuhan 2028-2022.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengelola keuangannya secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tertib. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 pasal 3 menyatakan keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam APBD

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kapasitas atau kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2014), Bentuk dari penilaian kinerja yaitu berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi

meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu pemerintahan daerah yang memiliki visi yaitu terwujudnya Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka Pemerintah Kota Medan perlu mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya Kota Medan perlu menerapkan prinsip-prinsip sistem penganggaran berbasis kinerja yang ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2005. Dengan adanya pemahaman yang benar dan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran dapat menghilangkan rasa tidak percaya, saling curiga dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan daerah, harus dapat mengelola keuangannya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bastian, 2015). APBD merupakan dana yang dianggarkan oleh suatu daerah untuk direalisasikan pada tiap periodenya. struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja daerah, Transfer, dan Pembiayaan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kota Medan antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran

rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Tabel 1.1 LRA Pendapatan Daerah 2018-2022

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2018	Pendapatan Daerah	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53
	Belanja	5.449.562.922.528,00	4.213.480.509.726,24
2019	Pendapatan Daerah	6.257.239.035.331,00	5.518.768.106.206,31
	Belanja	6.302.963.592.428,05	5.059.288.700.981,01
2020	Pendapatan Daerah	4.757.852.448.866,16	4.121.585.751.572,01
	Belanja	5.252.856.581.219,53	3.991.453.349.313,55
2021	Pendapatan Daerah	5.208.964.175.119,00	5.023.080.346.608,29
	Belanja	5.731.395.062.275,00	4.499.145.144.311,87
2022	Pendapatan Daerah	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85
	Belanja	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00

Sumber: LRA BKAD Kota Medan 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Hasil dari penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2021 Presentasi tidak terserap 100% Hasil dari penelitian Belanja Barang dan Jasa tahun 2017-2021 Presentasi tidak terserap 100%. Hasil dari penelitian Belanja Modal tahun 2017-2021 Presentasi tidak terserap 100%. Hasil dari penelitian Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya tahun 2017-2021 Presentasi tidak terserap 100%.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode

berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Medan, karena itu Pemerintah Kota Medan sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Medan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kota Medan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BKAD Kota Medan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
2. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
3. Kinerja pendapatan daerah BKAD Kota Medan yang belum sepenuhnya bisa di katakan baik. Karena, nilai anggaran jauh lebih besar daripada

realisasi yang di targetkan dan persentasenya berjalan fluktuatif setiap tahunnya.

1.3. Batasan Dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup Analisis kinerja keuangan yang dilihat dari aspek Rasio Kerasian, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan (BKAD) pada tahun 2018 sampai dengan 2022”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Bagaimana kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Kerasian.
3. Bagaimana kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat :

1. Kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Kemandirian
2. Kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Keserasian.
3. Kinerja keuangan BKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan).

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan khususnya Program Studi Akuntansi dalam penambahan ilmu yang terkait dengan Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Analisis Kinerja Keuangan BKAD Kota Medan Sumatera Utara (Studi Kasus Kantor Walikota Medan).

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Norma (2020), yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Enrekang” Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah di BKAD Kota Medan (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu terletak pada:

1. Variabel penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
2. Model penelitian: dalam penelitian terdahulu menggunakan model penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan model deskriptif.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
4. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di Kota Semarang, Sulawesi Selatan. Sedangkan yang penulis lakukan di Kota Medan, Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Teori keagenan merupakan perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan, untuk meminimalkan konflik tersebut dengan pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Artana, 2020).

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan masalah keagenan, teori keagenan mempelajari hubungan antara agen dan prinsipal. Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas, dalam hal ini bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi bagi masyarakat luas sebagai prinsipal. Teori keagenan merupakan teori yang dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal, dalam pemerintahan untuk

meminimalisir konflik, maka laporan keuangan adalah salah satu hal yang dapat meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat luas.

2.1.2 Pengertian Analisis Keuangan

Analisis yang interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dari hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Poltak Sinaga, 2014:220).

Menurut Hery (2015:132) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan kedalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan instansi, bagaimana pencapaian keberhasilan instansi masa lalu, saat ini dan prediksi dimasa yang akan datang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian arah perkembangannya.

2.1.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Dalam analisis terhadap laporan keuangan suatu instansi dapat dipergunakan beberapa metode dan teknik analisis data, alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut. Metode-metode analisis yang umum digunakan terdiri dari , yaitu:

1. Analisis statis dalam metode ini analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan pada suatu periode atau suatu saat saja tanpa mengetahui perkembangannya.
2. Analisis dinamis atau horizontal (*trend*), metode ini menganalisis laporan keuangan dengan cara mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan juga perkembanganyang terjadi.
3. Analisis rasio adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

2.1.4 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output efisien, efektivitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan. Dapat diartikan kinerja merupakan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau

kelompok disebuah instansi yang dilakukan oleh segmen, peringkat dan jabatan disuatu instansi.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hak yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga membandingkan antara standar yang ditetapkan (misalnya peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan.

Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Kemampuan

Kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah mengerjakan kerja maksimal. Struktur

organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja dilingkungan organisasinya. Mereka bersifat positif terhadap suatu kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, sebaliknya jika mereka bersifat negatif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup hubungan kerja, fasilitas, iklim, kebijakan pimpinan dan pemikiran kerja.

2.1.6 Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam kinerja yaitu:

1. *Rating scales* menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai.
2. *Critical incidents*, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atas perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku yang sangat negatif selama periode penilaian.
3. *Essay*, ini cenderung memusatkan perhatian pada perilaku esktrim dan tugas karyawan dari pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seseorang penilai.

4. *Work standart*, ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan.
5. *Rangking*, penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan.
6. *Forced distribution*, penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja kedalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal.
7. *Behaviourlly anchored ranting scales*, evaluator menilai pegawai berdasarkan jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya.

2.1.7 Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan

terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Wachid (2014) “Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai dengan target. Salah satu kinerja keuangan daerah adalah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu dinilai apakah pemerintah daerah telah menggali potensi daerah masing-masing untuk PAD yang optimum. Karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, masing-masing daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan PAD terutama bagi kabupaten/kota yang belum lama berdiri. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut menjalankan otonomi daerahnya.

Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang disertai tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

2.1.8 Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu

2.1.9 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. APBD juga diartikan sebagai rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah dengan rancangan yang menjadi dasar

penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup suatu pengeluaran.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

2. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- b. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- g. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- i. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- j. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.1.10 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

b. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik, dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

2.1.11 Analisis Rasio Keuangan Pada APBD

Rasio keuangan adalah perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan maupun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dimaksudkan sebagai alat ukur untuk menilai kondisi keuangan dan kinerjanya. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, sehingga angka yang diperbandingkan berupa angka-angka dalam satu periode atau lebih (Faud, 2016).

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dalam satu periode dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya sehingga menampilkan kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014).

Adapun beberapa pengukuran rasio keuangan daerah yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Mahmudi (2019) adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan dan Rasio Derajat Desentralisasi. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2014:292).

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan asli daerah (PAD) dibagi jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja menginformasikan kepada pihak pemangku kepentingan mengenai ukuran belanja daerah yang dikhususkan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya habis digunakan dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja ini bersifat rutin dan berulang serta dalam jangka pendek. Bagian belanja operasi menempati 60-90% dalam total belanja daerah.

Menurut Mahmudi (2019 :162) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran untuk membentuk dana cadangan yang berfungsi mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak diperoleh sekaligus dengan sepenuhnya untuk dibebankan dalam satu tahun anggaran. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Rasio belanja modal terhadap total belanja menginformasikan kepada pihak pemangku kepentingan tentang ukuran belanja yang dikhususkan pada investasi dalam bentuk belanja modal di tahun yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi

(2019:163) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5- 20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan yang kurang dan masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019). Pertumbuhan pendapatan yang diharapkan adalah pertumbuhan positif yang kecenderungannya terus meningkat.

Pertumbuhan juga berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Begitu juga sebaliknya semakin rendah Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin tinggi belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah negatif. Yang artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Tahun} - \text{Tahun (t-1)}}{\text{Tahun (t-1)}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

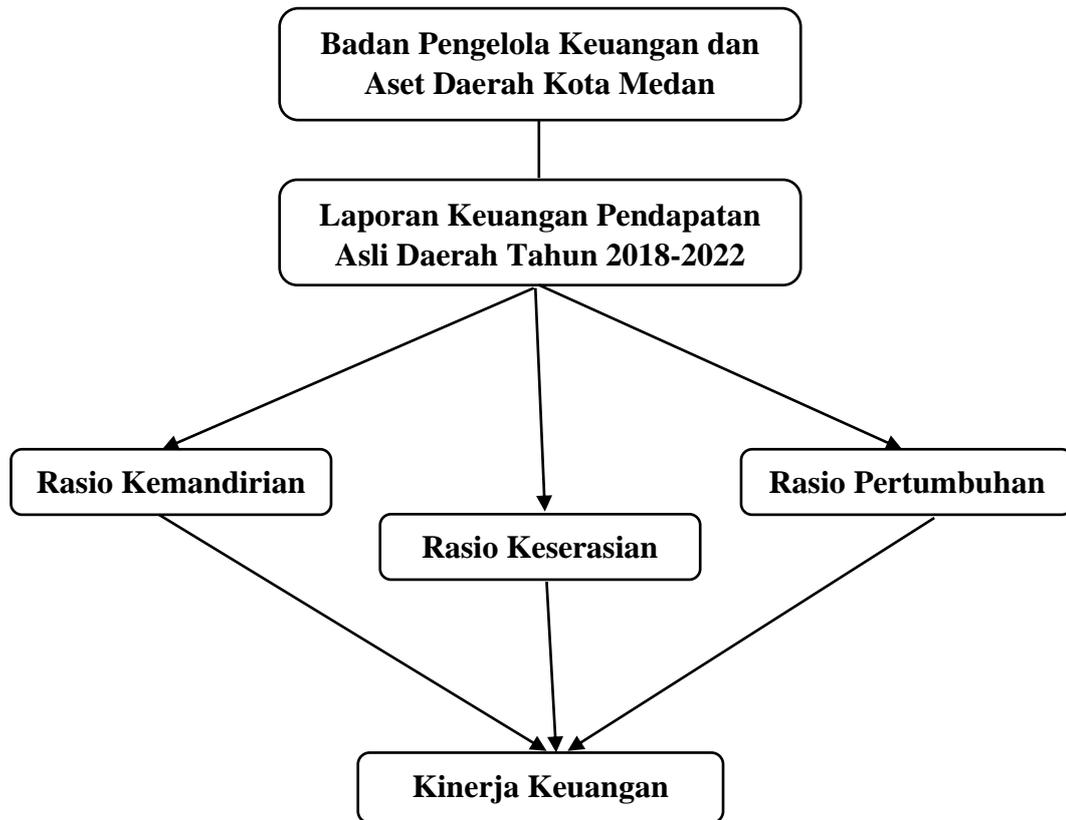
No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Amelia Okrivina, Ira Mariana (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintah Kota Depok-Jawa Barat)	Deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari ratio derajat desentralisasi fiscal dapat dikatakan cukup.
2	Rizki Sari, Agus Manandar (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020	Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini adalah derajat desentralisasi Kota Malang berdaa pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian kota Malang 50% (kecil), tingkat ketergantungan kota Malang pada transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.
3	Norma (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	Deskriptif Kuantitatif	Secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah baik.
4.	Nurul Huda (2022)	Analisis Kinerja	Deskriptif Kuantittatif	Kinerja keuangan pemerintahan Desa

		Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kec.Pemayung Kab.Batang Hari (2018-2020)		Serasah berdasarkan rasio derajat desentralisasi dikategorikan sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali dan termasuk pola hubungan intruktif, rasio efektivitas pendapatan asli daerah termasuk kategori tidak efektif.
5	Heri Faisal Harahap (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan pemerintah secara umum dikatakan cukup baik, meskipun rasio derajatnya masih tergolong rendah secara finansial.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan variabel dependennya adalah Kinerja Keuangan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis, (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis yang berfokus untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan angka-angka untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Erlina (2017), Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel, baik satu variabel atau lebih.

Penelitian menggunakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan menyajikan data keuangan berupa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori-teori yang telah ada.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan februari 2023 sampai dengan selesai. Berikut tampilan tahapan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Penelitian	JADWAL PENELITIAN															
		Feb 2023	Maret s/d Juni 2023	Juli 2023	Agustus s/d Desember 2023	Januari s/d Mei 2024											
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Kunjungan ke Instansi		■														
3	Pembuatan Proposal			■	■	■											
4	Seminar Proposal					■											
5	Riset						■										
6	Penyusunan Data							■	■	■	■	■	■				
7	Seminar Hasil												■				
8	Bimbingan Skripsi													■	■		
9	Sidang Meja hijau																■

Sumber: Penulis, (2023)

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah data laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu selama lima tahun terakhir (2018-2022).

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Data ialah kumpulan fakta atau angka yang mengungkapkan kebenarannya kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dianalisa sesuai dengan metode tertentu hingga hasilnya dapat diketahui.(Sugiyono, 2018).

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Skunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

3.5. Defenisi Operasional dan Pengukuran

Defenisi Operasional pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerah sendiri untuk kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanann kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah dibagi jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Mahmudi (2019)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menganalisis belanja operasi dan belanja modal terhadap belanja untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Rasio belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran sehingga sifatnya jangka pendek. Analisis belanja operasi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Sedangkan belanja modal merupakan porsi belanja daerah yang berbentuk tata letak investasi dalam belanja modal yang bersifat manfaat jangka menengah dan panjang. Analisis belanja modal dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah.

Belanja Operasi

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Tingkat pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif dalam kinerja anggarannya selama satu tahun atau beberapa periode. Tentunya, diharapkan pertumbuhan pendapatan positif dan trennya meningkat. Mahmudi (2019).

$$\frac{\text{Tahun } t - \text{Tahun } (t-1)}{\text{Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

t=Tahun sekarang atau tahun saat ini

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan yaitu menganalisis hasil perhitungan dari rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka, tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2017:224).

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang telah ada, yaitu dari Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 yang diperlukan oleh peneliti. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Studi Kepustakaan, yaitu metode yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan, jurnal ilmiah, skripsi, buku yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan menggunakan buku-buku teori yang digunakan sebagai pembantu dalam kegiatan teori permasalahan yang diteliti

3.7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 147).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Medan tahun 2018-2022.
2. Menghitung rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan dari pelaporan keuangan pemerintahan kota Medan.
3. Mendeskripsikan data dari hasil rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan (BKAD) disahkan pada tanggal 28 desember 2011. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah republik Indonesia melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara, dimana reformasi dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan penggantian peraturan perundang-undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintahan kolonial. Hal ini dikaitkan dengan besarnya belanja negara sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai selain pemeriksaaan keuangan yang dilakukan secara internal yaitu melalui satuan kerja pengawasan dan secara eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* lainnya agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dalam pengelolaan keuangan negara, maka untuk itulah diperlukan pertanggung jawaban pemerintah secara transparan atas penggunaan pajak yang bersumber dari masyarakat. Sebagai pendukung penerapan pelaksanaan *good governance* maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Landasan Hukum
2. Penataan Kelembagaan.
3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Keuangan.

2. Visi, Misi dan Logo Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

a. Visi BPKAD Kota Medan:

Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sebagai berikut:

"Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Profesional Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan Yang Sistematis, Efisien Dan Efektif"

b. Misi BPKAD Kota Medan:

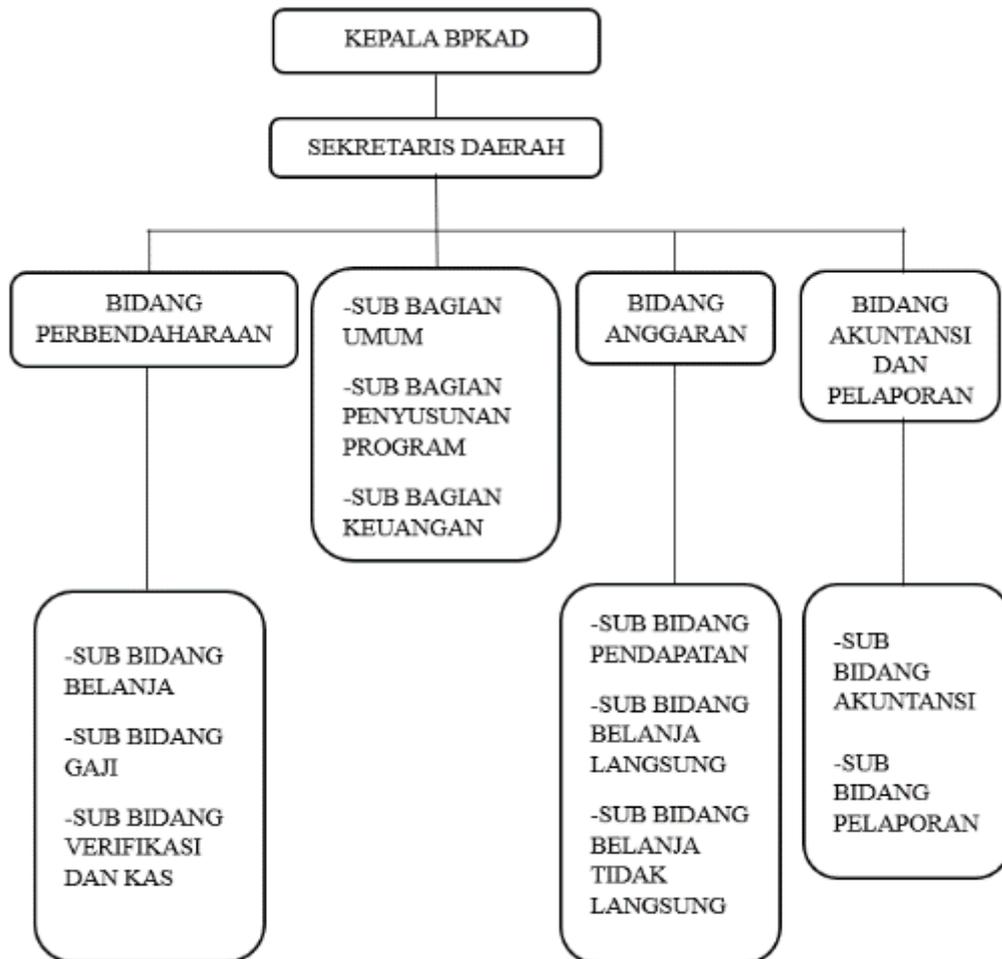
Berdasarkan visi yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, maka misi yang dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

4.1.2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas

1. Struktur Organisasi BKAD Kota Medan

Gambar 4.1 Bagan Organisasi BKAD Kota Medan



Sumber: <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Adapun Struktur Organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Badan
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Anggaran , membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Belanja Langsung
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Gaji
 - 2) Sub Bidang Belanja
 - 3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Akuntansi
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Uraian Pekerjaan (Job Description) BKAD Kota Medan

a. Kepala BKAD

Tugas Kepala BKAD adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
- 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.

b. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariat.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BKAD.
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BKAD.
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BKAD.
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya:

1) Sub Bagian Umum

Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian umum.

- a) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tatanaskah dinas, penataan kesiapan, perlengkapannya, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan BKAD.
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- d) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan hubungan masyarakat.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

c. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

Bidang Perbendaharaan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

1) Sub Bidang Gaji

Sub Bidang Gaji dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan. Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam lingkup gaji.

2) Sub Bidang Belanja

Sub bidang belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan.

3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas

Sub bidang verifikasi dan kas dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan Sub bidang verifikasi dan kas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan.

d. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

1) Sub Bidang Pendapatan

Sub bidang pendapatan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang pendapatan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup pendapatan dan pembiayaan.

2) Sub bidang Belanja tidak langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang belanja tidak langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup belanja tidak langsung.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan membawahi beberapa sub bidang yaitu:

1) Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Sub bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi.

2) Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Sub bidang pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan.

4.1.3. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Badan

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022). Adapun hasil analisis rasio tersebut sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri daerah pemerintahannya dalam kegiatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan total pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
	PAD	Pendapatan Transfer		
2018	1.636.204.514.683	2.617.414.243.849	62,51	Partisipatif
2019	1.829.669.955.348	3.401.878.083.958	53,78	Partisipatif
2020	1.509.831.081.747	2.478.930.403.414	60,89	Partisipatif
2021	1.906.512.189.047	2.977.574.253.244	64,03	Partisipatif
2022	2.230.554.495.746	3.150.952.726.119	70,78	Partisipatif
Rata-rata			62,39	Partisipatif

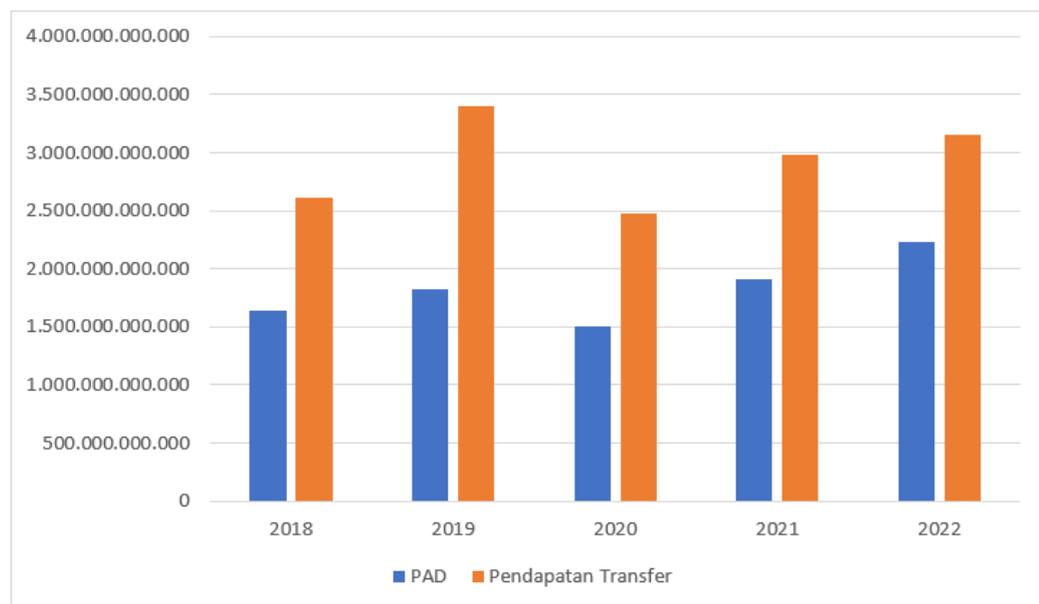
Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan namun, tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut pada tahun 2018 sampai 2022. Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Kemampuan keuangannya tergolong sedang dan termasuk pola hubungan partisipatif karena berada diantara 50% dan 75%.

Pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Medan sebesar 62,51%, yang termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan partisipatif karena berada diantara 50% dan 75%. Namun mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 53,78% dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 60,89% dan tahun 2021 sebesar 64,03% serta tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 70,78% dan juga termasuk kriteria sedang dengan pola hubungan

partisipatif karena berada diantara 50% dan 75%. Angka rasio tertinggi berada pada tahun terakhir yaitu tahun 2022, dan termasuk kriteria sedang dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 62,39. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Medan termasuk kriteria sedang dimana campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Medan tahun 2018-2022, menunjukkan PAD Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 namun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemberian dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dari pusat, pada tahun 2018 PAD sebesar Rp. 1.636.204.514.683 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.617.414.243.849 dengan pola hubungan Partisipatif. Pada tahun 2019 jumlah PAD senilai Rp.

1.829.669.955.348 dan Pendapatan Transfer senilai Rp. 3.401.878.083.958. Pada tahun 2020 PAD sebesar Rp. 1.509.831.081.747 dan jumlah Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.478.930.403.414. Pada tahun 2021 jumlah PAD Rp. 1.906.512.189.047 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.977.574.253.244. Dan pada tahun 2022 jumlah PAD sebesar 2.230.554.495.746 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.150.952.726.119.

2. Rasio Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat alokasi, dsitribusi, dan stabilisasi. Pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik (Mahmudi, 2019). Rasio keserasian dapat diukur dengan membandingkan rasio belanja operasi dengan total belanja daerah dan rasio belanja modal dengan total belanja daerah. Proporsi belanja operasi menempati 60-90% dalam total belanja daerah, sementara bagian belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20%.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan
Tahun 2018-2022

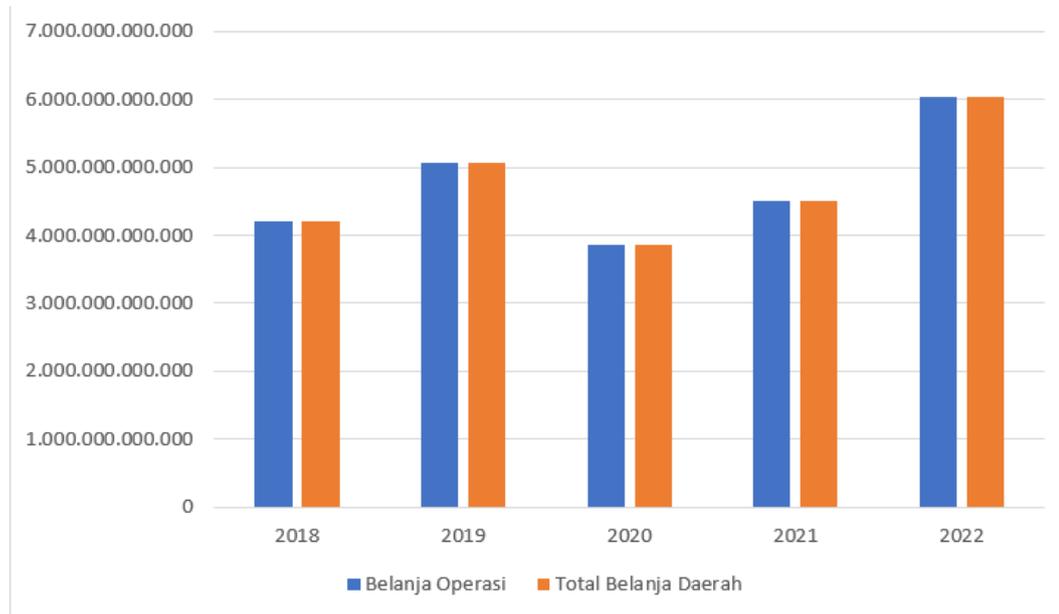
Tahun	Rasio Kesenjangan Daerah		Rasio (%)
	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	
2018	3.455.113.095.305	4.213.480.509.726	82,00
2019	4.066.127.201.868	5.059.387.661.308	80,37
2020	3.546.463.232.680	3.854.742.410.736	92,00
2021	3.833.501.098.374	4.499.145.144.311	85,20
2022	4.411.464.936.830	6.047.219.172.842	72,95
Rata-rata			82,50

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio belanja operasi pada tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuasi atau naik turun. Dimulai tahun 2018 jumlah presentase rasio belanja operasi sebesar 82,00%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 80,00%, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,00%, pada tahun 2021 menurun 85,20% dan pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 72,95%. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 82,50, yang mana dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai kegiatan keseharian pemerintahan tiap tahunnya.

Berdasarkan penilaian tersebut porsi belanja daerah yang dikeluarkan untuk operasional pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun yang dihitung dari tahun 2018, besarnya melebihi dari setengah belanja daerah yaitu lebih dari 50%. Hal ini menyatakan bahwasannya biaya operasional pemerintah daerah Kota Medan cukup besar tiap tahunnya dan sudah sesuai dengan teori Mahmudi yang pada umumnya belanja operasi berada pada kisaran 60-90%.

Gambar 4.3 Grafik Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik Rasio Keserasian keuangan daerah pemerintah kota Medan tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa rasio belanja operasi pada tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuasi atau naik-turun. Dimulai dari tahun 2018 Belanja Operasi sebesar Rp. 3.455.113.095.305 dengan rasio 82.00% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 4.066.127.201.868 dengan rasio 80.00% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2020 Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.546.463.232.680 dengan rasio 92.00% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan Belanja Operasi sebesar Rp. 3.833.501.098.374 dengan jumlah rasio 85.20% dari jumlah Total Belanja Daerah. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah Belanja Operasi sebesar Rp. 4.411.464.936.830 dengan jumlah rasio sebesar 72.50% dari Total Belanja Daerah.

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Medan
Tahun 2018-2022

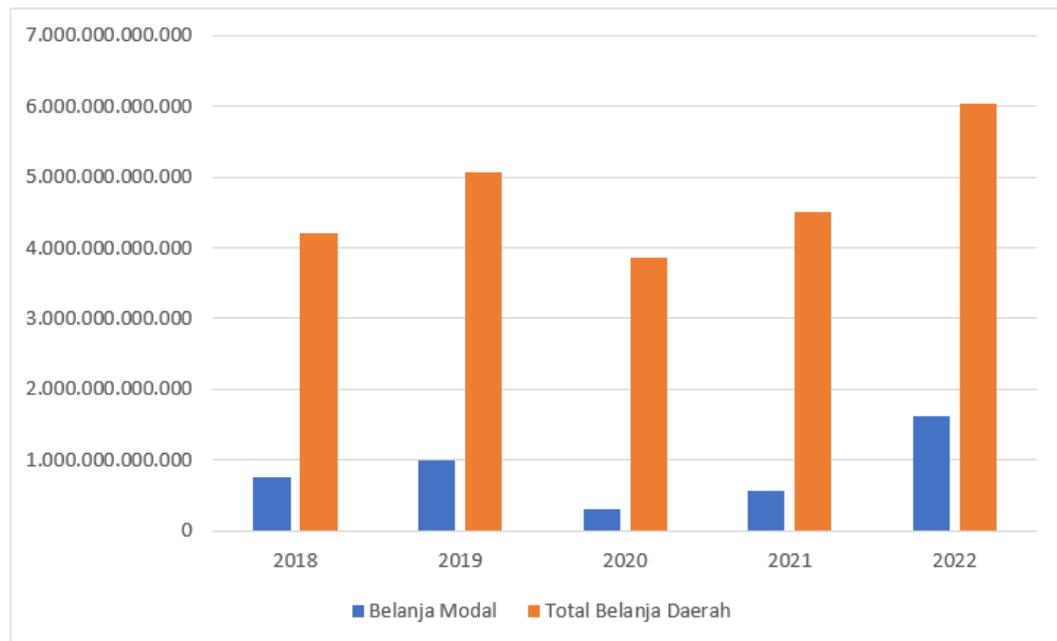
Tahun	Rasio Keserasian Daerah		Rasio (%)
	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	
2018	753.996.886.210	4.213.480.509.726	17,89
2019	992.661.245.694	5.059.387.661.308	19,62
2020	308.278.278.057	3.854.742.410.736	7,99
2021	574.604.617.139	4.499.145.144.311	12,77
2022	1.617.535.812.652	6.047.219.172.842	26,74
Rata-rata			17,00

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata rata rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja yaitu sebesar 17,00. Selama lima tahun berturut turut rasio belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 rasionya sebesar 17,89% meningkat menjadi 19,62% pada tahun 2019. Kemudian tahun 2020 menurun menjadi 7,99, pada tahun 2021 meningkat menjadi 12,77% dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi 26,74%.

Berdasarkan penilaian tersebut bahwasannya proporsi umum untuk belanja modal yaitu sebesar 5-20%. Porsi belanja modal pemerintah kota medan tahun 2018-2022 sudah sesuai yaitu berkisar antara 5-20%.

Gambar 4.4 Grafik Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik rasio keserasian daerah pemerintah kota Medan pada tahun 2018 dengan Belanja Modal sebesar Rp. 753.996.886.210 dengan jumlah rasio 17.89% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan Belanja Modal sebesar Rp. 992.661.245.694 dengan rasio sebesar 19.62% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 308.278.278.057 dengan jumlah rasio sebesar 7.99% dari Total Belanja Daerah. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan Belanja Modal sebesar Rp. 574.604.617.139 dengan jumlah rasio sebesar 12.77% dari total belanja daerah. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.617.535.812.652 dengan jumlah rasio sebesar 26.74% dari total belanja daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke

tahun. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan daerah yang kurang dan masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019).

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Tahun } t - \text{Tahun } (t - 1)}{\text{Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio Pertumbuhan Daerah		Rasio (%)
	Pendapatan _t	Pendapatan ₀	
2018	4.253.618.758.532	4.409.065.482.200	-3,52
2019	5.518.772.179.306	4.253.618.758.532	29,74
2020	3.988.761.485.152	5.518.772.179.306	-27,72
2021	5.023.080.346.608	3.988.761.485.152	25,93
2022	5.449.340.586.722	5.023.080.346.608	8,48
Rata-rata			6,582

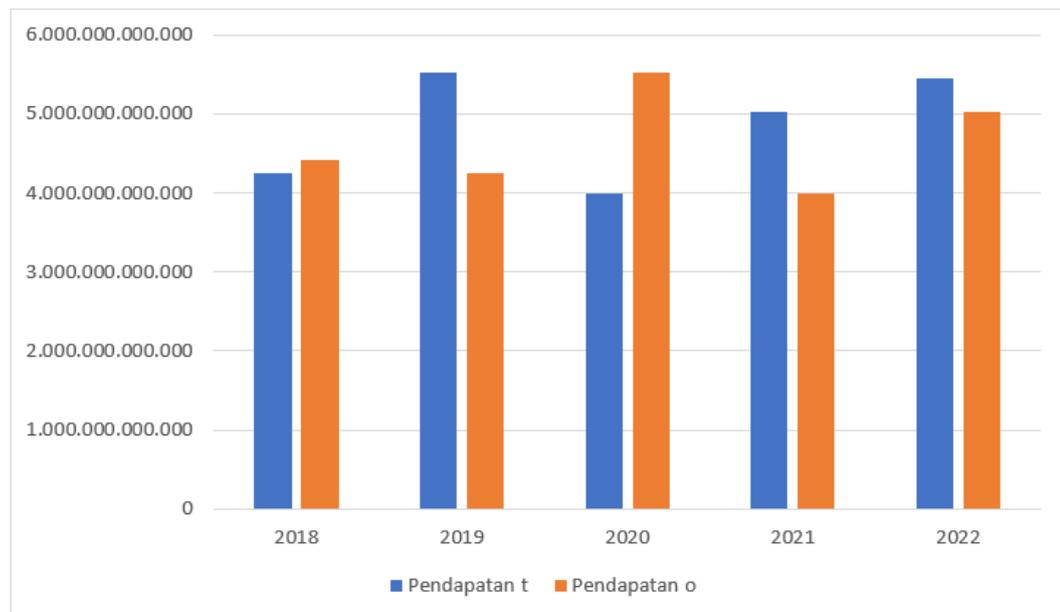
Sumber: Data Diolah, (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rasio pertumbuhan pendapatan dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2018 sebesar -3.52%, tahun 2019 meningkat menempati angka 29.74%, tahun 2020 menurun menjadi -27.72%, tahun 2021 meningkat menjadi 25.93% dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi 8.48%.

Pada tabel diatas diketahui juga bahwa selama 5 tahun memperlihatkan pertumbuhan pendapatan yang kurang baik karena mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada

pemerintah Kota Medan tahun 2018-2022 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah pendapatan yang diterima pemerintahan kota Medan kurang maksimal.

Gambar 4.5 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik Rasio Pertumbuhan paa daerah Pemerintah Kota Medan 2018-2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 Rp. 4.253.618.758.532 dengan rasio -3.52% dari Pendapatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.518.772.179.306 dengan rasio 29.74 dari Pedapatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp. 3.988.761.485.152 dengan rasio -27.72% dari Pendapatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.023.080.346.608 dengan rasio 25.93% dari Pendapatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp. 5.449.340.586.722 dengan rasio 8.48% dari tahun sebelumnya.

4. Analisis Kinerja Keuangan

Menganalisis hasil perhitungan dari rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan dengan melihat hasil rata-rata, dimana rasio kemandirian 62.39%, rasio keserasian dengan rata-rata 82.50% dan rasio pertumbuhan dengan rata-rata 17.00%.

4.2. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kota Medan dapat dilihat dari rasio kemandirian yang didapatkan untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kota Medan yang menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 1.636.204.514.683 atau setara dengan 62.51% dari total pendapatan transfer. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.829.669.955.348 atau setara dengan 53.78% penurunan ini disebabkan meningkatnya pendapatan eksternal, namun pola hubungan masih bersifat partisipatif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan Rp.1.509.831.081.747 atau 60.89%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada sebesar Rp.1.906.512.189.047 atau 64.03%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.230.554.495.746 atau 70.78% dan pada tahun 2022 merupakan rasio tertinggi selama lima tahun berturut-turut. Rasio kemandirian keuangan daerah jika dilihat rata-ratanya memperoleh angka 62.39% dengan kemampuan keuangan yang masih tergolong sedang memiliki pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang,

mengingat tingkat kemandirian pemerintah Kota Medan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kriteria kemandirian keuangan daerah dikatakan sedang jika persentase berada diantara 50-75% dengan pola hubungan partisipatif yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Sementara rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Medan berada di angka 62,39%, sehingga disebut pola hubungan partisipatif dengan kemampuan keuangan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah (Halim, 2014).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dari tahun 2018-2022 mengalami naik turun. Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.636.204.514.683. Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.829.669.955.348. Pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.509.831.081.747. Pada tahun 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.906.512.189.047. Pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.230.554.495.746.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Kemandirian dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan pada tahun 2018 sebesar 62.51%, tahun 2019 sebesar 53.78%, tahun 2020 sebesar 60.89%, tahun 2021 sebesar 64.03%, tahun 2022 sebesar 70.78%. Rasio Kemandirian keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 2018-2022 dikategorikan partisipatif karena nilai yang diperoleh berada diantara 50% dan 75%. Dari uraian

dan hasil perhitungan pada rasio kemandirian, kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan partisipatif karena 62.39%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan tergolong baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Berdasarkan perhitungan dari rasio Kemandirian dapat diketahui bahwa rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 dikategorikan partisipatif karena nilai yang diperoleh diatas 50-75%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian, kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat karena nilai rata-rata yang didapat 62.39%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BKAD kota Medan cukup baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rindang Arumdari (2019) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan memiliki rasio $> 50\%$ artinya rasio keuangan termasuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif.

Menurutnya penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama dengan alasan-alasan penyebab yang penulis cantumkan, dimana Pemerintahan Daerah mendekati mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kota Medan. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi (Mahmudi, 2019). Dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Kota Medan terhadap total belanja sebesar 82.50%. Rasio belanja operasi tahun 2018-2022 mengalami kondisi fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi sebesar 82.00%, kemudian tahun 2019 menurun sebesar 80.37%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 92.00%, pada tahun 2021 menurun sebesar 85.20% dan tahun 2022 kembali menurun menjadi 72.95%. Dapat dilihat bahwa rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 92.00 dan rasio terendah pada tahun 2022 sebesar 72.95%.

Diketahui rata-rata rasio keserasian belanja modal pemerintah kota Medan terhadap total belanja sebesar 17.00%. Rasio belanja modal terhadap total belanja mengalami penurunan dimana dapat diketahui bahwa tahun 2018 rasio belanja modal sebesar 17.89%, kemudian tahun 2019 meningkat sebesar 19.62%, tahun 2020 menurun sebesar 7.99%, tahun 2021 meningkat sebesar 12.77% dan tahun 2022 sebesar 26.74%.

Dapat dilihat bahwa belanja modal pada pemerintah kota Medan dapat dikatakan sudah stabil atau harmonisasi dikarenakan sudah melewati ukuran besarnya rasio belanja modal terbaik berada diangka 5-20%. Sama halnya dengan rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal juga tidak memiliki ukuran rasio yang pasti. Pengukuran rasio ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi mengenai besaran belanja daerah yang dialokasikan bagi belanja modal. Namun perbedaannya porsi belanja yang besar menginformasikan memiliki kecenderungan pendapatan yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih rendah menunjukkan juga porsi belanja modal yang besar. Perbedaan ini disebabkan karena pemerintah daerah dengan pendapatan lebih rendah menyesuaikan untuk melakukan belanja modal sebagai sebagai unit dari pendanaan modal berjangka panjang (Mahmudi, 2019).

3. Rasio Pertumbuhan

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari rasio Pertumbuhan yang didapatkan untuk menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 pendapatan sebesar Rp.4.253.618.758.532 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 4.409.065.482.200 sehingga memperoleh rasio pertumbuhan sebesar -3.52%. Pada tahun 2019 pendapatan meningkat sebesar Rp. 5.518.772.179.306 dengan rasio 29.74%, pada tahun 2020 menurun sebesar Rp.3.988.761.485.152 dengan rasio sebesar -27.72%, pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 5.023.080.346.608 dengan rasio 25.93% dan tahun 2022 menurun sebesar Rp. 5.449.340.586.722 dengan rasio 8.48%.

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan keuangan daerah dari tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata memperoleh angka sebesar 6.58%. Pertumbuhan pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29.74% dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2018 sebesar -3.52%.

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang kurang dan masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode dengan kecenderungan (trend) meningkat (Mahmudi, 2019). Pemerintah Kota Medan memperoleh nilai negatif dengan trend yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota medan tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode di karenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rindang Arumdari (2019) menyimpulkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan keuangan pemerintah Kota Medan mengalami pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan. Menurutnya penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama dengan alasan-alasan penyebab yang penulis cantumkan, yaitu kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan jika dilihat Rasio kemandirian dikategorikan partisipatif karena rata-rata partisipatifnya dari 2018-2022 62.39%.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan jika dilihat dari rasio keserasian tahun 2018-2022 mangalami kondisi fluktuasi. Rasio belanja operasi tiap tahunnya mengalami kestabilan atau harmonisasi, berdasarkan rata-ratanya sebesar 82.50%. Dan pada rasio belanja modal juga mengalami kestabilan atau harmonisasi, berdasarkan rata-ratanya sebesar 17.00%. Dengan hal tersebut besaran untuk alokasi belanja operasi mengalami kenaikan dan alokasi belanja modal mengalami penurunan.
3. Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan jika dilihat dari rasio pertumbuhan tumbuh secara negatif dengan pendapatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota medan tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah

dicapai dari periode ke periode di karenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.**

Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga meningkatkan tingkat pertumbuhan dan memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak rasio sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu, diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. **Periode waktu pada penelitan ini dapat diperpanjang jangka waktunya untuk mendapatkan hasil yang lebih dan memuaskan. Karena periode waktu penelitian ini relatif singkat dan hasil penelitian ini dapat berubah apabila laporan APBD tahunan terbaru sudah keluar.**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Arumdari, R. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*.
- Bastian, Indra, (2015). *Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar*, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Deddi, Iswahyuni, (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Sri Mulyani. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama. Medan: USU Press.
- Faud, Moh. Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogorbas
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- <https://medankota.bps.go.id>, diakses 8 Mei 2023.
- <https://pemkomedan.go.id>, diakses 15 Mei 2023
- Juwanda. (2021). *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Labi, Alfred. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013– 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 5 No. 1*, Maret 2019 Universitas Halmahera.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296-2313.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.
- Siregar, A. O. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan*. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES

OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Amelia O, Ira M (2020), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- Rizki S, Eka P (2021), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
- Norma, (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang*.Diakses (09 Mei 2023)
- Nurul Huda (2022), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (2018-2020)*.Diakses (09 Februari 2023)
- Heri F.H, (2020), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Akuntansi*
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.